

mengkritisi dan menolak segala bentuk ketidakadilan.⁹ Atau dalam bahasa Edward W. Said, intelektual publik. yang berkomitmen memiliki panggilan untuk menyuarakan kebenaran di hadapan penyalahgunaan kekuasaan. Walaupun ungkapan Said bisa dianggap *klise* seperti diutarakan Christopher Hitchens, frase abstrak itu bisa memuat di dalamnya hal penting bahwa intelektual adalah agen keadilan. Keadilan biasanya di pahami dalam arti distribusi sumber daya dan kekayaan secara merata. Tetapi dalam hubungan dengan fungsi sosial intelektual distribusi keadilan bisa kita pahami lebih luas untuk merangkum juga hubungan antara ide dan tindakan.¹⁰ Artinya, intelektual yang berkomitmen tidak hanya melahirkan tetapi membuka juga ruang agar kata menjadi aksi.

Kedua, intelektual yang berpihak. Bagi Michel Foucault, komitmen intelektual untuk mempertanyakan ketidakadilan dan menyuarakan yang benar saja sebetulnya tidak cukup. Intelektual mesti mengambil langkah lanjut dengan berpihak pada korban ketidakadilan dan memainkan peran sebagai suara dari yang tak bersuara serta harapan dari yang tak memiliki harapan di hadapan kekuasaan yang mengungkung.¹¹ Intelektual karena itu memiliki peran khusus untuk melakukan intervensi bukan saja ketika kekuasaan disalahgunakan tetapi melanjutkan *intervensi* itu dengan pilihan jelas yakni keberpihakan pada yang menderi dan menjadi korban. Ide yang sama dikemukakan juga oleh Edward W. Said dalam diskusinya seputar wacana dan kekuasaan. Bagi Said, intelektual ada

⁹ Sartre, J.P. *The Writings of Jean-Paul Sartre*, dalam M. Contat dan M. Rybalka (Eds), (Evanston: Northwestern University Press, 1974), 76-79.

¹⁰ Fuller, S. (2006), "*The Public Intellectual as Agent of Justice: in Search for a Regime*", dalam *Philosophy and Rhetoric*, Vol. 39(2): 147-156.

¹¹ Foucault, M, *Language, Counter-memory, Practice*, (Ithaca: Cornell University Press, 1977), 167-170.

aliran pemikiran ini mempunyai kekuatan untuk menggerakkan dan merangsang nalar tetapi di lain pihak sangat sulit untuk kita telaah nilai analitis dan normatif yang menjadi sendi bangunan aliran-aliran pemikiran ini. Dalam konteks ini, intelektual memainkan peran dalam memilih secara kritis konsep tepat yang bisa dipakai untuk bangunan sosial masyarakat, termasuk fungsi kritis atas hukum dan penataan serta pelaksanaan. Ini menghantarkan kita pada konsep ‘legislator’ dan ‘interpreter’ yang dibahas Zygmunt Bauman dalam *Legislators and Interpreters: On Modernity, Post-Modernity and Intellectuals*.¹⁴ Dalam peran ‘legislator’, intelektual mengamati secara kritis alasan dan rasionalisasi hukum dan sistem perundangan yang mengatur hidup masyarakat. Peran ini tidak berhenti di sini. Intelektual juga memainkan peran sebagai ‘interpreter’ yakni menafsirkan sistem ini dan menghantarnya ke masyarakat luas dalam bahasa yang bisa dipahami. Singkatnya intelektual adalah mediator antara sistem dan anggota masyarakat.

Memperhatikan fungsi-fungsi seperti telah dipaparkan, kiprah intelektual berhubungan sangat erat dengan ide *civil society* yang sehat. Konsep *civil society* mengambil tempat antara keluarga dan Negara. Bila keluarga menempati ruang, hidup individual dan hidup sosial, kepentingan pribadi dan etika, urusan pribadi dan kehendak.¹⁵ Untuk sederhananya dan dalam konteks paparan tulisan ini, arena *civil society* yang dipaparkan G.W.F. Hegel bisa dipertimbangkan di sini.¹⁶ Bagi Hegel, *civil society* mengambil tempat antara keluarga dan Negara. Bila keluarga

¹⁴ Bauman, Z, *Legislators and Interpreters: On Modernity, Post-Modernity and Intellectuals*, (Cambridge: Polity, 1987), 35.

¹⁵ Selligman, A, *The Idea of Civil Society*, (New York: The Free Press, 1992), 5.

¹⁶ Hegel, G.W.F, (1995) *Lectures on Natural Right and Political Science: The First Philosophy of Right*, di terjemahkan dari bahasa Jerman oleh J.M. Stewart & P.C. Hodgson, London: University of California Press, khususnya bagian III.

